

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR
DI KECAMATAN DUREN SAWIT**

SKRIPSI

**PUTRI SAFITRI DARMA YANTY
NPM. 1831040108**



Program Studi : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR
DI KECAMATAN DUREN SAWIT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ushuluddin
dan Studi Agama

Oleh

**PUTRI SAFITRI DARMAYANTY
NPM. 1831040108**

Program Studi : Pemikiran Poltik Islam

**Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.
Pembimbing II : Abd. Qohar, M.Si.**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pendidikan merupakan kebutuhan untuk mendukung berlangsungnya proses pengembangan sumber daya manusia. Pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum dapat menjangkau seluruh penduduknya, salah satu faktor penyebabnya adalah kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yaitu program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Program ini tentunya belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyaknya penyalahgunaan yang sering dilakukan, contohnya pada orang tua siswa yang masih banyak belum mengerti tentang program ini juga para siswa yang menilai program ini sebagai bahan untuk bergaya hidup bukan untuk meningkatkan prestasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *Kualitatif* yang bersifat *Deskriptif*. Sumber data primer menggunakan *Teknik Purposive Sampling*. Proses analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian serta penarik kesimpulan dengan menggunakan triangulasi data. Teori yang digunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, dalam hal ini peneliti ingin melihat beberapa indikatornya yaitu 1). Komunikasi (*Communication*), 2). Sumber Daya (*Reseources*), 3). Struktur Birokrasi (*Bereaucratic Structure*), 4). Sikap Pelaksana (*Dispotition*) yang membantu peneliti menjelaskan variabel yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil dari pengolahan data, maka hasil penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 174 Tahun 2015 tentang bantuan biaya personal pendidikan dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Pada kenyataannya di lapangan implementasi KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme KJP di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi. Masukan yang diberikan yaitu diperbaikinya persyaratan pendaftaran dan instrumen wawancara, ditingkatkannya pengawasan oleh sekolah dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, perlunya dibentuk staff khusus disekolah untuk menangani KJP, serta meningkatkan kerjasama sosialiasasi dengan para stakeholder.

Kata Kunci: *Implementasi, Kartu Jakarta Pintar, Bantuan Biaya Personal Pendidikan.*

ABSTRACT

Education is a necessity to support the ongoing process of human resource development. In fact, education in Indonesia still cannot reach the entire population, one of the contributing factors is poverty. The Provincial Government of DKI Jakarta created the Jakarta Smart Card (KJP) program, which is a strategic program to provide access for DKI Jakarta residents from disadvantaged communities to education at least up to high school/vocational high school graduation, fully funded from DKI Jakarta Provincial APBD funds. This program is of course not going well because there are still many abuses that are often carried out, for example parents of students who still do not understand much about this program as well as students who see this program as material for a lifestyle not to improve achievement.

The method used in this research is descriptive qualitative research. Primary data sources using Purposive Sampling Techniques. The data analysis process was carried out by collecting data, reducing data, presenting and drawing conclusions using data triangulation. The theory used is the policy implementation theory according to Edward III, in this case the researcher wants to see some of the indicators, namely 1). Communication (Communication), 2). Resources, 3). Bureaucratic Structure (Bereaucratic Structure), 4). Executor's Attitude (Disposition) which helps researchers explain the variables studied.

Based on the research that has been done and the results of data processing, the results of this study are the Implementation of Governor of DKI Jakarta Regulation No. 174 of 2015 concerning assistance with personal education costs from underprivileged families through the Jakarta Smart Card. In fact, in the field of KJP implementation, there are still problems related to the aims and objectives of KJP itself, targets, KJP mechanisms on the part of schools, monitoring and reporting as well as related to prohibitions and sanctions. The inputs given are improving registration requirements and interview instruments, increasing supervision by schools and giving strict sanctions if violations occur, the need to form special staff at schools to handle KJP, and increasing socialization cooperation with stakeholders.

Keywords: Implementation, Smart Jakarta Card, Personal Education Assistance.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Safitri Darmayanty

NPM : 1831040108

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit” adalah benar-benar hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terdapat penyimpangan dari karya ini maka sepenuhnya tanggung jawab peneliti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta dengan penuh kesadaran, untuk itu harap dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, November
2022



Putri Safitri Darmayanty



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN


Judul skripsi : **IMPLEMENTASI KARTU JAKARTA PINTAR
DI KECAMATAN DUREN SAWIT**
Nama : **Putri Safitri Darmayanty**
NPM : **1831040108**
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**


MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si
NIP. 1975031200321003


Abd. Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam


Abd. Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Kartu Jakarta Pintar di Kecamatan Duren Sawit”**. Disusun oleh **Putri Safitri Darmayanty**, NPM: **1831040108**, Jurusan **Pemikiran Politik Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, pada hari/tanggal: **Rabu, 01 Februari 2023, pukul 09.00-10.30 WIB**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Suhandi, M. Ag.

Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb, M.Kes.

Pembahas Utama : Drs. Effendi, M. Hum.

Pembahas I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Pembahas II : Abd. Qohar, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Ahmad Isaeni, MA
NIP. 197403302000031001

MOTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَآ
لُبَّغِيٍّ ۚ يَعْظُمُ لَعَنُكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S An-Nahl:90)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillahirobilalamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada ALLAH SWT atas segala nikmat-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu dan beriman kepada-Mu. Skripsi ini akan ku persembahkan untuk orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu :

1. Teruntuk kedua orangtua ku, Bapak Ahmad Dasuki dan Ibu Junaeni yang telah sangat berjasa dalam hidupku, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, doa, pengorbanan, jerih payah dan dukungan yang selalu diberikan hingga terselesainya skripsi peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki, dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin.
2. Teruntuk adik ku tercinta Puja Astuti yang selama ini memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan kepada peneliti.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Putri Safitri Darmayanty lahir pada tanggal 11 Desember 2000 di daerah Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Peneliti anak pertama dari Bapak Ahmad Dasuki dan Ibu Junaeni.

Peneliti mulai menempuh pendidikan formal di SDN Jatibening Baru IX, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Mitra Nusantara, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dan lulus pada tahun 2015. Lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas yaitu di SMK Kawula Indonesia, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu UIN Raden Intan Lampung pada fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit”. Semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit”, dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) UIN Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam selalu kita nantikan syafa’atnya diakhir kelak, Aamiin ya rabbal alamiin.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi masih banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini peneliti, ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, terutama kepada bapak ibu :

1. Prof. Wan Jamaludin, PhD, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr, Ahmad Isnaeni, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Abd Qohar, M.Si, Selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam sekaligus Pembimbing Akademik serta Ibu Citra Wahyuni, M.Si selaku Sekertaris Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si. Selaku pembimbing I dan Abd Qohar, M.Si Selaku pembimbing II dengan penuh keikhlasan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta semangat kepada peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama beserta staffnya, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh narasumber yang telah berkontribusi dan membantu sampai terselesainya skripsi ini.
8. Seluruh keluarga yang selalu mendukung serta memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman jurusan pemikiran politik islam angkatan 2018, khususnya PPI kelas A yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, baik materi serta memberikan semangat terhadap peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman seperjuanganku Ikhwanuddin yang selalu mensupport sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti setelahnya.

Bandar Lampung, 2022
Penulis

Putri Safitri Darmayanty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
H. Metode Penelitian	16
I. Kerangka Teoritik	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori	25
B. Konsep Kebijakan Publik.....	25
C. Pengertian Program.....	31
D. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Program.....	32
E. Konsep Pendidikan Gratis	34
F. Program Kartu Jakarta Pintar	36

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN DUREN SAWIT

A. Luas Wilayah Kecamatan Duren Sawit	41
B. Batas Wilayah	42
C. Jumlah Penduduk	43
D. Mobilitas Penduduk	44
E. Gambaran Keadaan Penduduk Kecamatan Duren Sawit ...	45
F. Gambaran Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Duren Sawit	47
G. Visi Kecamatan Duren Sawit	47
H. Misi Kecamatan Duren Sawit.....	48
I. Perkembangan Pembangunan Kecamatan Duren Sawit	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Program Kartu Jakarta Pintar	50
B. Hasil Penelitian	53
C. Implementasi Program	54
D. Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program.....	66
E. Interpretasi Hasil Penelitian	75
F. Pembahasan	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel 1.1 Kriteria siswa Penerima KJP

Tabel 1.2 Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2021

Tabel 1.3 Data Siswa Miskin di Kecamatan Duren Sawit

Tabel 1.4 Data Primer

Tabel 2.1 Mekanisme Tahapan Pelaksana Program KJP

Tabel 2.2 Unit Cost Program KJP

Tabel 3.1 Data Luas Wilayah Kecamatan Duren Sawit

Tabel 3.2 Luas Wilayah Serta Jumlah RT dan RW Kecamatan Duren Sawit

Tabel 3.3 Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kartu Keluarga

Tabel 3.4 Data Penduduk Berdasarkan Umur

Tabel 3.5 Distribusi Penduduk Kecamatan Duren Sawit Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.6 Data Pemilik Agama di Kecamatan Duren Sawit

Tabel 3.7 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 3.8 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Duren Sawit

Tabel 4.1 Data Informan

Tabel 4.2 Taksonomi Hasil Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teoritik

Gambar 4.1 Tampilan Website Resmi KJP

Gambar 4.2 Pasal 9 Pergub No. 27 Tahun 2013

Gambar 4.3 Pasal 13 Pergub No. 27 Tahun 2013

Gambar 4.4 Bentuk Fisik Kartu ATM KJP

Gambar 4.5 Antrian Pencairan KJP di Kantor Cabang Bank DKI
Kecamatan Duren Sawit

Gambar 4.6 Format Laporan Pembelanjaan BBPP Melalui KJP

Gambar 4.7 Skema Keberhasilan Sosialisasi

Gambar 4.8 Skema Ketidakberhasilan Sosialisasi

Gambar 4.9 Skema Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Verifikasi

Gambar 4.10 Skema Ketidakberhasilan Penyaluran KJP

Gambar 4.11 Skema Keberhasilan Pelaporan Pembelanjaan Dana KJP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara
2. Lampiran Transkrip Wawancara
3. Dokumentasi
4. Surat Izin Penelitian
5. Daftar Hadir Sidang Munaqosyah
6. Surat Keterangan Cek Turnitin
7. SK Judul

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PENEGLASAN JUDUL

Pada bagian penegasan judul ini akan diuraikan secara rinci untuk memperjelas pokok bahasan skripsi ini, maka dipandang perlu memberikan makna terhadap kata-kata penting yang terkandung dalam judul “**Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit**”. (Studi Pada Sekolah Menengah Keatas di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur). Guna menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, peneliti perlu terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut antara lain sebagai berikut :

Menurut teori George Edward implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.¹ George Edward juga berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya sumberdaya implementor dan sumberdaya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor dapat disposisi yang baik maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

¹ George Edward III, Implementasi Kebijakan Publik, 1980.

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi, adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang juga akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²

Kartu Jakarta Pintar adalah (KJP) yaitu program strategis yang memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.³ Menurut Poerwodarminto yang dimaksud dengan Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, sedangkan prestasi belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seseorang siswa pada jangka waktu tertentu dan dicatat dalam rapor sekolah.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah dari “Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit” bahwasannya kartu jakarta pintar (KJP) disini yang akan dilakukan penelitiannya yakni kartu jakarta pintar (KJP) untuk siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Yang dimana sebelumnya pada KJP tersebut di khususkan untuk siswa yang kurang mampu tetapi berprestasi.

Namun salah satu program dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan ini masih banyak yang belum paham sehingga masih banyak pula masyarakat dari kalangan yang bisa di

² Dody Setyawan, Agus Priantono NC, Firman Firdausi, Model George Edward III : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Malang, Jurnal Politik & Sosial, Vol.3, 2021, No.2.

³ A. Afriansyah, Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta, Jurnal Kependudukan, 2017.

⁴ Noor Komari Pratiwi. Pengaruh Tingkat Pendidikan Perhatian Orang Tua dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia SMK Kesehatan di Kota Tangerang, Jurnal Pujangga, Vol. 1, 2015, No. 2.

golongan menengah keatas yang mendapatkan KJP tersebut. Siswa-siswa dari kalangan menengah keatas yang mendapatkan KJP tersebut kebanyakan adalah siswa yang tidak memiliki prestasi sehingga dirasa tidak adil karena masih banyak dari kalangan tidak mampu yang malah tidak mendapatkan bantuan KJP tersebut.

1.2 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan alat yang menentukan dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu bangsa dan sarana membangun karakter bangsa. Pendidikan diharapkan menjadi proses dimana pengetahuan, keyakinan, nilai, keterampilan dan aspek penting lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan mandiri. Masyarakat suatu bangsa merupakan investasi besar dalam mendukung proses pembangunan di suatu negara, baik dari segi budaya aturan dasar (hukum), sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Terbentuknya pendidikan bermutu yang dapat mengantarkan manusia pada kecerdasan dan kepercayaan diri sangat tergantung pada kerangka sistem penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kejelasan pedoman kebijakan yang ditetapkan.

Pendidikan merupakan serangkaian usaha yang sangat efektif untuk mencapai kemajuan bangsa akan berwujud secara nyata dengan usaha untuk menciptakan ketahanan nasional. Keberhasilan suatu sistem pendidikan dikatakan baik dengan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan dan memiliki kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara kesatuan republik indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah kemiskinan, karena kemiskinan menjauhkan masyarakat untuk menjangkaunya. Kemiskinan juga menyebabkan terbatasnya minat masyarakat dalam mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan disini berperan penting dalam mengentaskan masalah kemiskinan.

Beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya aspek ekonomi yaitu dengan rendahnya kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang memiliki dampak pada rendahnya penghasilan sehingga menyulitkan untuk memperoleh pendidikan.

Hak untuk memperoleh layanan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*" dan pada pasal 34 ayat 2 yang berbunyi "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia*"⁵. Didalam Undang-Undang juga telah diatur tentang sistem pendidikan di Indonesia pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 Ayat 1 "*Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, penandaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat*".

Sesuai dengan instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 dan peraturan menteri pendidikan No. 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan dari program Kartu Jakarta Pintar ialah merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya pernah ada yaitu batuan siswa miskin. Program ini bertujuan guna meningkatkan akses pendidikan anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan dan ikut serta mencegah anak putus sekolah⁶.

Kebijakan dari Program Kartu Jakarta Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang kerap kali terjadi karena masih banyak siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sanagat rentan terhadap terjadinya putus sekolah. Hal ini disebabkan karena perekonomian keluarga yang tidak mampu serta kurang mendukung, sehingga anak tersebut

⁵ Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Petunjuk Teknik Program Indonesia Pintar (PIP), (Jakarta : Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas,2016),h.2.

memutuskan untuk berhenti sekolah. Sumber dana dari program ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBN-P).

Program ini merupakan program kerja sama dengan tiga kementerian yaitu kementerian pendidikan, dan kebudayaan (KEMENDIKBUD), Kementerian Sosial (KEMENSOS), Serta Kementerian Agama (KEMENAG)⁷. Salah satu sekolah yang ada di kecamatan Duren Sawit yang memiliki siswa penerima bantuan program Kartu Jakarta Pintar adalah SMK Kawula Indonesia Jakarta Timur . SMK Kawula Indonesia terletak di kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Terdapat 315 siswa yang menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar. Masing-masing siswa disekolah ini menerima bantuan sebesar Rp 5. 400.000 pertahunnya tersebut tujuannya digunakan untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantara lain untuk membeli tas, buku, alat tulis serta kebutuhan lainnya.

Namun yang terjadi berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Mastur selaku orang tua siswa menurut beliau bahwasannya masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga yang mampu yang terdaftar sebagai penerima dana Program Kartu Jakarta Pintar serta masih adanya siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima dana bantuan Kartu Jakarta Pintar. Padahal yang seharusnya pemerintah meluncurkan program ini yang di khusukan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu supaya mendapatkan kesempatan dalam pendidikan yang sama⁸. Fungsi dari dana program ini adalah pembelian buku serta alat tulis sekolah, pembelian seragam sekolah serta perlengkapan sekolah lainnya dan juga biaya transportasi sekolah serta uang saku yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.

Permasalahan lain yang terjadi dalam program Kartu Jakarta Pintar ini menurut ibu Ita Kusmala selaku staff kesiswaan SMK Kawula Indonesia bahwasannya menurut beliau program KJP ini masih belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan

⁷ <https://indonesiapintar.kemendikbud.go.id/>(Diakses pada, 12 Desember 2019 pukul 20.58 WIB).

⁸ Wawancara dengan bapak Mastur selaku orang tua siswa penerima KJP.

hal ini terlihat dari masih rendahnya pengetahuan wali murid tentang peruntukan bantuan KJP, dalam pemberian bantuan ini kurang tepat sasaran, terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan bantuan dana program Kartu Jakarta Pintar oleh penerima bantuan program ini. Terjadi kesulitan bagi pemerintah untuk mengawasi karena penyaluran bantuan dana tersebut langsung ke siswa dan orang tua siswa yang mengelola, sehingga sekolah tidak mengetahui dengan jelas dana tersebut digunakan untuk apa saja, pada saat wali murid tidak bisa mengelola dana tersebut dengan baik maka akan terjadi banyak penyalahgunaan dari dana tersebut yang seharusnya untuk kebutuhan sekolah melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadi.⁹

Pemenuhan Bantuan Biaya Pendidikan Personal (BBPP) melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dirancang agar siswa dari keluarga kurang mampu semakin terbantu untuk memiliki kemampuan mengikuti proses pendidikan dengan baik. Dalam panduan program KJP tahun 2013, pada halaman 8 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan siswa miskin disini adalah siswa pada tingkat SD sampai dengan SMK yang secara pribadi dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun pendapatan orang tuanya yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan, serta biaya ekstrakurikuler. Adapun di bawah ini disajikan tabel kriteria siswa penerima program KJP sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kriteria Siswa Penerima Program KJP

Kriteria Peserta Didik Penerima Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)	
1	Tidak merokok atau mengonsumsi narkoba
2	Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai
3	Menggunakan angkutan umum
4	Daya beli untuk sepatu dan seragam sekolah rendah

Wawancara dengan ibu Ita Kusmala selaku staff kesiswaan SMK Kawul indonesia

5	Daya beli untuk buku,tas dan alat tulis rendah
6	Daya beli untuk konsumsi makanan/jajan rendah
7	Daya pemanfaatan internet rendah
8	Tidak dapat mengikuti ekstrakurikuler yang mengeluarkan biaya

(Sumber : Website Resmi KJP)

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 106 Tahun 2012, sasaran penerima program KJP ini bersumber dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011. Data penduduk Provinsi DKI Jakarta kategori 40% rumah tangga Indonesia berpenghasilan terendah tercatat 332.465 ribu jiwa yang termasuk dalam usia sekolah (7-8 tahun). Data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2022

Usia	San gat Mis kin	Mis kin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Jum lah	Keterangan
7-12 Tahun	84.8 30	49.9 13	32.176	3.467	170. 386	SD/SDLB/MI
13-15 Tahun	36.9 96	26.0 29	18.606	2.220	83.8 52	SMP/SMPLB/MT s
16-18 Tahun	28.7 10	24.9 80	21.721	2.816	78.2 27	SMA/SMALB/SM K/SMKLB/MA
Total	150. 536	100. 922	72.504	8.503	332. 465	

(Sumber : Buku Pedoman Program KJP 2013 hal.3)

Data PPLS tahun 2011 mengalami pergerakan pada 2 kelompok umur, yaitu anak usia 5-6 tahun dan usia 17-18 tahun, dimana anak usia 5-6 tahun, pada tahun 2011 saat ini sudah bersekolah SD/MI, dan anak usia 17-18 tahun pada tahun 2011 saat ini sudah tamat SMA/MA/SMK, disamping terjadinya kemungkinan pindah domisili atau keluar wilayah DKI Jakarta, maka terjadi kemungkinan jumlah kuota peserta didik calon penerima KJP tahun 2013, tidak sesuai pada jumlah 332.465 siswa. Kondisi inilah yang

melegitimasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penjarangan data baru calon penerima KJP yang diambil dari peserta didik dari keluarga tidak mampu yang namanya tidak tercatat dalam data PPLS. Arah tindakan ini mengandung resiko yang cukup besar apabila tidak dibarengi dengan kecermatan, ketelitian dari para pelaksana program didalam mengimplementasikannya. Karena sangat berhubungan dengan keefektifan dalam menjangkau sasaran dan tujuan dari program KJP tersebut.

Dalam penerapannya, program KJP mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat kota Jakarta. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang wajar bila program KJP dikategorikan sebagai kebijakan yang tepat. Dengan diimplementasikannya program KJP oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan akan meningkatkan akses dan kepastian masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan minimal wajib belajar 12 tahun, terutama bagi warga yang kurang mampu.

Program KJP ini memberikan kemudahan dalam teknis penyaluran dan BBPP tersebut, yaitu berupa Kartu ATM Bank DKI kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria penerima KJP. Rekening Bank DKI yang dibuatkan atas nama siswa yang bersangkutan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya, karena dana BBPP tersebut dapat langsung diterima oleh tiap-tiap siswa penerima KJP tersebut melalui ATM setiap kurun waktu yang ditentukan. Dana BPSM yang diberikan adalah sebesar Rp 250.000,-/ bulan kepada peserta didik tingkat SD/SDLB/MI, dan Rp 350.000,-/ bulan kepada peserta didik tingkat SMP/SMPLB/MTs, dan Rp 450.000,-/ bulan kepada peserta didik tingkat SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA.

Sebagaimana lazimnya suatu kebijakan, kendati berstatus sebagai kebijakan yang sesuai dengan Program KJP tidak terlepas dari berbagai kendala dalam mencapai tujuannya. Berbagai kendala tersebut munculbersamaan dengan berjalannya pelaksanaan program KJP itu sendiri. Salah satu kendala yang sangat mungkin terjadi adalah dalam hal keakuratan data. Data yang terseleksi sebagai peserta didik penerima KJP haruslah data yang memenuhi kriteria cermat,

akuntabel, dan tepat sasaran. Data yang tidak cermat, tidak akuntabel, dan tidak tepat sasaran menjadi peluang terbukanya penyimpangan dana BPSM yang disalurkan melalui program KJP tersebut.

Temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) seharusnya menjadi peringatan bagi pelaksana program KJP dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak sekolah, serta segenap elemen masyarakat. ICW melansir bahwa sebanyak 19,4% peserta penerima KJP tidak tepat sasaran. Jumlah penerima KJP yang tidak tepat sasaran tersebut terjadi dijenjang pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLM/MTs, hingga SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA. Selaras dengan ICW, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan adanya KJP ganda yang disalurkan kepada 9.006 Penerima yang senilai dengan Rp 13.34 Miliar. Temuan ICW dan BPK setidaknya menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program KJP.

Program KJP dilaksanakan secara merata di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Menurut data dari situs resmi tentang KJP, jumlah siswa penerima KJP se-provinsi DKI Jakarta adalah 399.971. yang terdiri dari total 258.512 orang dengan tingkat pendidikan SD/SDLB/MI. 84.742. ditingkat SMP/SMPLB/MT. Dan juga pada tingkat SMA/SMK sederajat ada 56.717 orang. Melihat data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah siswa penerima KJP sebanyak 332.465 dari pendataan PPLS 2011. Walaupun diasumsikan ada siswa penerima KJP yang tidak tercatat dalam PPLS, perbedaan yang cukup besar sekitar 67.506 orang yang menunjukan kemungkinan pemberian KJP tidak tepat sasaran. Selain itu , jumlahnya akan bertambah seiring dengan usulan penerima KJP tahun 2014.

Telah dijelaskan di atas bahwa program KJP dilaksanakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Salah satu wilayah yang melaksanakan program KJP ini yaitu pada lingkungan Kecamatan Duren Sawit. Kecamatan Duren Sawit merupakan salah satu kecamatan yang masuk kedalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Data yang diolah peneliti dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan situs resmi KJP menunjukkan bahwa Kecamatan Duren Sawit memiliki presentase penduduk kurang mampu tertinggi di Jakarta Timur. Data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Siswa Miskin di Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Pasar Rebo	849	5.308	6.157
2	Ciracas	817	7.254	8.071
3	Cipayung	3.287	4.060	7.347
4	Makasar	0	2.625	2.625
5	Kramat Jati	747	3.460	4.207
6	Jatinegara	1.468	3.580	5.043
7	Duren Sawit	852	9.576	10.428
8	Cakung	0	12.281	12.281
9	Pulo Gadung	2.717	3.548	6.265
10	Matraman	1.669	4.100	5.769
	Total	11.631	55.792	68.193

(Sumber : dari Staff Kecamatan Duren Sawit)

Dengan adanya perhatian yang besar dari masyarakat provinsi DKI Jakarta terhadap program KJP ini, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya judul skripsi yang berjudul implementasi Kartu Jakarta pintar terhadap prestasi siswa SMK di Kecamatan Duren Sawit. Karena program KJP di atas segalanya merupakan bagian dari upaya memberikan pendidikan gratis kepada warga kurang mampu yang membutuhkan dengan dukungan dan nasihat. Hal ini penting untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program KJP ke depan.

Jumlah siswa SMK di Kecamatan Duren Sawit sebanyak 1028 orang dan yang terdaftar sebagai penerima KJP sebanyak 1363 siswa hasil observasi awal dan wawancara menemukan identifikasi permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program KJP di tingkat SMK di wilayah kecamatan Duren Sawit isu-isu tersebut antara lain yang berindikasi kuat bahwa penerima peserta KJP tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan observasi awal peneliti di sekolah-sekolah SMK di Kecamatan Duren Sawit tidak mencerminkan siswa yang termasuk dalam kriteria disabilitas dengan siswa mengikuti KJP dalam hal penampilan sehari-hari, aktivitas,

pendapatan orang tua, kondisi tempat tinggal, dan roda transportasi yang dipakai sehari-hari ke sekolah.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Lukman selaku man pendidikan menengah Duren Sawit juga ditetapkan bahwa jumlah cabang dikman di setiap kecamatan di Jakarta Timur hanya terdiri dari satu orang seksi. Di Kecamatan Duren Sawit hanya ada satu seksi digmen lingkungan titik mandat Dinas Pendidikan Kecamatan adalah menangani penyelenggaraan pendidikan menengah di tingkat kabupaten, termasuk validasi data atau audit program. Sebenarnya ada 30 SMK di lingkungan Duren Sawit ini adalah masalah sumber daya.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan pada ibu nurrohmah selaku staf suku dinas pendidikan menengah Jakarta Timur, ditemukan bahwa pengawasan dari pelaksanaan program KJP selama ini masih terbilang lemah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah hanya menyentuh pada tahap verifikasi data tentang pengajuan peserta ataupun laporan penggunaan dana BBPP yang telah digunakan oleh siswa penerima KJP. Pengawasan secara masif lebih banyak di titik beratkan di sekolah titik ada kalanya terdapat sekolah-sekolah yang cenderung kurang cermat dalam melaksanakan pengawasan terhadap program KJP tersebut. Hal ini masih menjadi suatu permasalahan dari segi karakteristik agen pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan kepada ibu nurrohmah selaku staf suku dinas pendidikan menengah Jakarta Timur, ditemukan pula bahwa sosialisasi kepada stakeholder atau orang tua siswa tentang kejelasan dan ketentuan program KJP masih kurang optimal. Hal demikian mengakibatkan belum sepenuhnya masyarakat mengetahui bahwa KJP adalah untuk siswa dari kalangan tidak mampu saja. Selain itu, rendahnya kesadaran orang tua dalam memahami dan menaati ketentuan program KJP menjadi sisi permasalahan lainnya hal ini berkaitan karena pengaruh lingkungan ekonomi sosial, dan politik yang ada.¹⁰

Ibu nurrohmah juga mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program KJP selama ini relatif lemah. Audit pemerintah hanya sampai pada tahap validasi data mengenai presentasi peserta

¹⁰ Wawancara dengan bapak Lukman selaku SUDIN Pendidikan Menengah (DIKMEN).

atau laporan penggunaan dana bbbp yang digunakan oleh siswa penerima KJP. Terkadang ada sekolah yang cenderung kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan program KJP hal ini menimbulkan masalah dalam hal karakteristik faktor pelaksanaan program. Hal tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu nurrohmah ditemukan juga bahwa sosialisasi kepada stakeholder atau keluarga siswa masih belum optimal terkait kejelasan dan ketentuan program KJP. Hal ini menyebabkan masyarakat belum mengetahui sepenuhnya bahwa KJP diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu selain itu, rendahnya kesadaran orang tua juga dalam memahami dan mentaati program KJP menjadi persoalan lain. Ini tentang dampak lingkungan ekonomi sosial dan politik saat ini.¹¹

Adanya kebijakan program Kartu Jakarta Pintar yang berasal dari pusat ini mendorong untuk mengimplementasikan secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit.

1.3 Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti memfokuskan penelitian pada :

A. Fokus Penelitian

- 1.** Manajemen pengawasan Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa Di Kecamatan Duren Sawit masih terbilang lemah.
- 2.** Rendahnya kesadaran orang tua siswa dalam memahami dan menaati ketentuan Program Kartu Jakarta Pintar.

B. Sub-Fokus Penelitian

- 1.** Manajemen pengawasan Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa SMK Di Kecamatan Duren Sawit sudah dilakukan tetapi masih terbilang lemah dikarenakan masih banyak siswa-siswa yang tidak memenuhi kriteria.
- 2.** Sudin Pendidikan Menengah Kecamatan Duren Sawit bekerja sama dengan pihak bank, pihak sekolah serta orang

¹¹ Wawancara dengan ibu Nurrohmah selaku staff suku Dinas Pendidikan.

tua siswa, dan di harapkan dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan terhadap Kartu Jakarta Pintar tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Implementasi Kartu Jakarta Pintar Di Kecamatan Duren Sawit ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah atau langkah dalam mengatasi masalah-masalah tersebut maka adanya suatu tujuan dari penelitian tersebut :

Untuk mengetahui implementasi kartu Jakarta pintar di kecamatan duren sawit.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

A. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi serta wawasan pemikiran khususnya pengembangan ilmu politik tentang kebijakan pemerintah terkait terlaksananya sistem tata kelola pemerintah yang baik.
2. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan sumbangan pemikiran dibidang perpolitikan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan melalui penelitian tentang “Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Siswa Di Kecamatan Duren Sawit”.

B. Manfaat Praktis

1. Memberi masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap penerapan tentang tata kelola sistem pendidikan gratis yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Kartu Jakarta Pintar.
2. Bagi objek penelitian saya diharapkan penelitian ini untuk mengetahui implementasi tingkat kematangan bantuan pendidikan dari pemerintah.
3. Bagi kecamatan Duren Sawit dan Sekolah-Sekolah yang ada di Kecamatan Duren Sawit khususnya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan yang paling menjurus yaitu ilmu pengetahuan di jurusan Pemikiran Politik Islam disuatu saat nanti dan bisa menjadi rujukan atau referensi bagi para akademisi yang akan melakukan kajian atau penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini. Serta penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat sebagai penilai lembaga pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat.

1.7 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian dari skripsi yang bersifat sentral. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar tentang penelitian yang dilaksanakan baik menyangkut masalah penelitian serta cara penelitian yang dilaksanakan.

Untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas mengenai permasalahan yang sama dengan karya ilmiah sebelumnya, meskipun terdapat kesamaan dalam penelitian baik berbentuk buku, karya ilmiah dan skripsi yang mengkaji tentang kartu jakarta pintar. Adapun karya ilmiah yang berhubungan dengan judul ini diantaranya :

1. Tahun 2020 dengan judul “*Evektifitas Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Manfaatnya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di SDN Bintaro 08 Pagi, Jakrta Selatan*”. Skripsi ini fokus pada evektifitasnya suatu program KJP tersebut pada sekolah dasar bintaro 08 pagi, Penelitian ini memakai

metode kualitatif dalam mencari informasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa kesaksian dari orang tua siswa yang mendapatkan KJP tersebut. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa masih belum berjalan dengan lancar suatu program KJP ini yang dimana para orang tua siswa masih banyak yang belum memahami manfaat dari KJP tersebut, yang dimana masih banyak juga penyalahgunaan dalam penggunaan kartu tersebut sehingga belum berjalan dengan lancar.

2. Skripsi atas nama Laelatul Sa'diyah yang dibuat pada tahun 2016 dengan judul "*Pengaruh Penggunaan Kartu Jakarta Pintar Terhadap Motivasi Belajar Keluarga Miskin di SMP Negeri 50 Jakarta*". Skripsi ini fokus pada seberapa besarnya pengaruh dari KJP ini terhadap motivasi belajar siswa dari kalangan menengah kebawah yang bersekolah di SMP Negeri 50 Jakarta, kegiatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya KJP tersebut sangat membantu perekonomian dan biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, jika mereka menggunakan kartu tersebut dengan benar. Hanya saja masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan penggunaan KJP tersebut sehingga kartu tersebut tidak berguna dan di pakai dengan baik.
3. Skripsi atas nama Novia Suci Lestari yang dibuat pada tahun 2020 dengan judul "*Analisis Penggunaan Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Dalam Rencana Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMK Nurul Islam Jakarta*". Skripsi ini fokus pada pembayaran SPP yang ditanggung dengan KJP yang dimana ini sangat membantu perekonomian keluarga, kegiatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa KJP Plus ini yang dimana besaran nominal yang didapatkannya lebih besar dibandingkan KJP yang sebelumnya dan juga KJP ini sangat membantu perekonomian keluarga yang dimana bisa meringankan orang tua siswa untuk membayar SPP.

4. Jurnal yang berjudul : “*Pengaruh Kartu Jakarta Pintar (KJP) Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XII Di SMK Dharma Putra 1 Jakarta*”, karya Sari, M. N., Putrie, C. A. R., & Nurhayati dalam jurnal edukasi: Volume 1, Nomor 1, April 2018 yang fokus membahas tentang pengaruh KJP terhadap motivasi belajar siswa, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa motivasi belajar siswa yang mendapatkan KJP akan kah para siswa tersebut bisa mempertahankan nilai mereka dan menambah motivasi baru untu terus giat dalam belajar, yang dimana sangat penting karena kalau tidak memenuhi kriteria dari KJP tersebut maka secara otomatis KJP tersebut akan dicapa dari pusat.

Jadi dari semua skripsi ataupun jurnal terdahulu yang menyerupai dari penelitian ini adalah dimana peneliti memfokuskan pada Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Kecamatan Duren Sawit. Oleh karena itu, para pengawas yang bertugas dalam pengurusan dan pendataan siswa yang mendapatkan KJP harus lebih teloti sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan dalam penggunaan KJP tersebut, juga sebagai tolak ukur para siswa untuk lebih giat belajar.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Selain itu metodologi penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara kerja yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan aturan-aturan buku (sistematika dan metode) dari masing-masing disiplin ilmu yang berkaitan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian

dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif disebut juga dengan interpretative research, naturalistic reserch, atau phenomenological research. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu, serta lebih banyak meneliti hal hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif juga lebih mementingkan proses dari pada hasil akhir. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang di temukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenal sebagai "*grounded theory research*".¹²

2. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Sesuai dengan kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field work research), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, reprepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³ Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang jelas, utuh dan komprehensif

¹² Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia,2019. 6-7.

¹³ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandun g: PT. Remaja Rosadakarya, 2006). 6.

melalui pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam tentang suatu perilaku tertentu yang dialami dan diamati dalam suatu konteks yang dikaji. Adapun data yang dibutuhkan adalah data yang berkenaan atau mencakup dengan Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kelurahan Duren Sawit.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu Fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti, atau sebagai prosedur dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi.¹⁵ Pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi sosial tertentu, dengan melakukan pengumpulan data kepada narasumber yang dianggap paham terhadap situasi sosial tersebut. Penentuan narasumber menggunakan teknik purposive sampling, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasari pada pertimbangan tujuan yang telah di tetapkan peneliti. Pertimbangan ini maksudnya

¹⁴ Hadari Nawaw, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: gama press, 1987). 63.

¹⁵ M. Iqbal hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 81.

ialah orang yang dianggap paham tentang hal-hal yang peneliti harapkan, serta anggota sampel dipilih secara khusus.

Data primer penelitian ini menggunakan responden dan informan dalam menghimpunan data-data yang dibutuhkan. Informen dalam penelitian ini yaitu orang yang terlibat secara langsung dalam program kartu Jakarta pintar.

Tabel 1.4 Data Primer Penelitian

NO	INFORMAN	JABATAN	ALASAN
1	Bapak Lukman	Sudin Pendidikan Menengah	Dikarenakan untuk kunci informan yang akan dijadikan fokus penelitian terhadap skripsi ini mencari tau pengelolaan tentang KJP dan pendataan penerima KJP.
2	Ibu Nurrohmah	Staff suku dinas kecamatan Duren Sawit	Dikarenakan staff suku dinas juga ikut andil dalam program Kartu Jakarta Pintar,
3	Bapak Bayu Harley	Staff di Kecamatan Duren Sawit	Dikarenakan ingin mengetahui lebih dalam mengenai pendataan pada penerima KJP.
4	Bapak Mastur	Warga Kecamatan Duren Sawit	Dikarenakan ingin mengetahui bagaimana kartu jakarta pintar ini membantu perekonomian keluarganya dan menjadikan motivasi

			belajar anaknya yang mendapatkan KJP tersebut.
--	--	--	--

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁶ Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau di publikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berupa arsip, foto, dokumentasi kegiatan dan lain-lain yang terkait objek penelitian. Data-data yang diperoleh peneliti dan wawancara pada informen penelitian dapat dilihat dari tabel yang dibedakan berdasarkan jenis data dan sifat data penelitian sehingga kedua data tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam karya tulis ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber data yang valid agar kemudian dapat diolah dan dihimpun dalam karya ilmiah adalah dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Sehingga penulis menggunakan beberapa metode berikut ini :

1. Wawancara (*Interview*)

Metode ini adalah dialog terbuka tanya-jawab antara peneliti dengan narasumber guna mengumpulkan data untuk diolah, baik berupa tulisan, video, rekaman suara ataupun lainnya. Wawancara sendiri sangat membantu apalagi ada beberapa hal yang tidak bisa dijawab dan diketahui dengan hanya mengandalkan sumber literasi saja. Melalui metode ini peneliti melakukan dialog interaktif kepada narasumber yakni pemerintah desa karang anyar dalam mengumpulkan informasi dan data valid

¹⁶ Ibid, h. 94

¹⁷ Hadi Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: YPFAK, Psikologi UGM, 1985),h.89

terkait implementasi kartu Jakarta pintar terhadap prestasi siswa di Kecamatan Duren Sawit

2. Dokumentasi

Ini adalah metode sebagai bukti kuat bahwa penelitian yang dilakukan itu nyata dan benar adanya tanpa manipulasi informasi. Sehingga dokumentasi diambil untuk momen yang memang dinyatakan bahwa telah melakukan penelitian dengan narasumber beserta lokasinya. Termasuk juga di dalamnya ada dokumen-dokumen yang menunjang keabsahan penelitian ini. Dokumentasi ini dapat berupa video record, rekaman, catatan penelitian, foto, laporan kegiatan, akun/media sosial, dll.

3. Analisis dan Penyajian Data

Setelah berbagai sumber didapatkan, maka peneliti mengolah data-data tersebut dengan cara deskriptif-analisis. Maksudnya peneliti berusaha menganalisis secara kritis apakah semua sumber tersebut memang benar adanya, baik secara normatif maupun empiriknya. Sehingga nantinya penyajian karya tulis ilmiah dapat disajikan dengan apik dan matang untuk memudahkan pembaca atau yang lainnya dalam memahami karya tulis ilmiah ini.

Menurut Prof. Sugiyono proses analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu mulai dari pra-riset sebelum ke lapangan menggunakan data sekunder, kemudian observasi langsung terhadap penelitian untuk memastikan dan mengumpulkan data yang valid selain data sekunder, hingga seleksi dari berbagai data yang dikumpulkan untuk diuraikan dalam rangka penyajian hasil riset yang layak dan sesuai kepada pembaca.

Adapun penyajian data (Data Display) dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dsb. Namun, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Berikut tahapan dalam analisis data :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Adalah teknik analisis data dalam bentuk merangkum, mengambil hal-hal yang perlu/penting, dikerucutkan pada hal-hal yang utama/pokok, menentukan tema dan polanya. Data yang direduksi tadi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu. Untuk itu peneliti melakukan reduksi data yang diambil dari lapangan terkait Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit.

b. Manipulasi Data

Merupakan bentuk analisis yang mengubah atau menyederhanakan data setelah data digolongkan dan dipecah-pecahkan menjadi kelompok-kelompok. Kemudian dilakukan manipulasi data sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Selain itu juga, mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena, sehingga data-data mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan.

c. Conclusion Drawing/Verifaction (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berubah deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁸

1.9 Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan alat berfikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka di buatlah kerangka berfikir sebagai berikut.

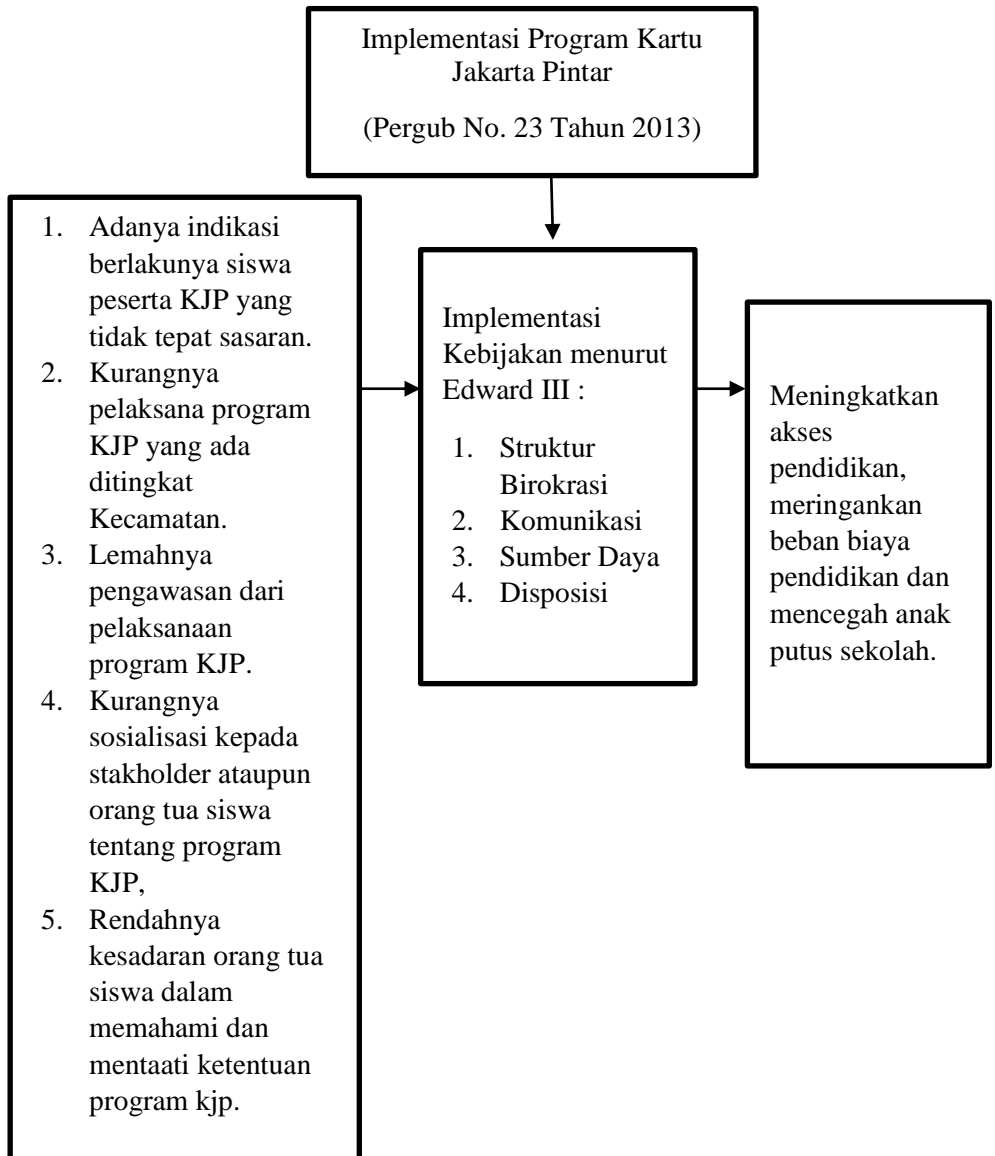
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit “. Sehingga peneliti mendeskripsikan Implementasi Program tersebut dengan apa senyatanya terjadi di lapangan dengan konsep yang telah dirancang oleh pemerintah. Sehingga peneliti memperoleh banyak data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Ternyata banyak sekali masalah – masalah yang ditemukan antara lain adanya indikasi berlakunya siswa peserta Kartu Jakarta Pintar yang tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kurangnya jumlah pelaksana program kartu jakarta pintar yang ada ditingkat Kecamatan. Manajemen pengawasan dari pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar masih terbilang lemah. Kurangnya sosialisasi pada stakeholder ataupun warga orang tua siswa tentang program Kartu Jakarta Pintar. Rendahnya kesadaran orang tua siswa dalam memahami dan mentaati ketentuan program Kartu Jakarta Pintar.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program sehingga penelitian ini menggunakan teori menurut Edward III, dimana menurutnya Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh sumberdaya, karakteristik, agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan berikut ini :

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2013.

Gambar 1.1
Kerangka Teoritik



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori yaitu menjelaskan tentang teori-teori atau konsep yang dipergunakan dalam penelitian yang sifatnya utama, tidak tertutup dan kemungkinan bisa juga bertambah seiring dengan pengambilan data pada saat di lapangan. Deskripsi teori ini menjadi pedoman dalam penelitian ini dan juga menerjemahkan fenomena-fenomena sosial yang ada dalam penelitian. Pada deskripsi teori ini teori yang relevan yang peneliti kaji sesuai dengan permasalahan-permasalahanyang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Penelitian mengenai Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit yang dikaji oleh beberapa teori dalam ruang lingkup administrasi negara konsentrasi kebijakan publik, yaitu : Implementasi Kebijakan, Konsep Pendidikan Gratis, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan untuk melengkapinya peneliti melampirkan penelitian terdahulu yang juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kenijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan aturan-aturan dan merupakan bagian dari keputusan politik yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat pada umumnya yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas publik, yakni yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, setelah melalui proses pemilihan yang berlaku sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijaankan oleh birokrasi pemerintah.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Oleh karena itu dalam rangka menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan dibarengi hak menarik pajak dan retribusi, pemerintah memegang teguh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya dan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang ada dan berkembang dimasyarakat.

Pengertian tentang apa itu kebijakan telah banyak didefinisikan oleh para ahli dan sumber. Menurut Robert Eyestone bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan definisi kebijakan publik menurut Chief J.O mengatakan bahwa suatu tindakan bersaksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Yang di mana menurut Chief J.O bahwa kebijakan publik adalah suatu fakta integritas daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preventi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan khususnya pada proses perumusan. Yang selanjutnya Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Berkaitan dengan hal tersebut James Anderson mendefinisikan kebijakan publik yaitu kebijakan yang merupakan arah dari tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas, penulis dapat simpulkan bahwa kebijakan publik adalah yang dipilih pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan berkaitan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan ataupun penyelesaian masalah di suatu negara titik dalam suatu kebijakan mempunyai tahapan-tahapan, tahapan-

¹ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h.23.

tahapan kebijakan publik yang sebagaimana dikemukakan oleh William Dunn yaitu:

1. Tahap penyusunan agenda
2. Tahap formulasi kebijakan
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap implementasi kebijakan
5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat mengenai masalah implementasi suatu kebijakan yang berupa program kartu Jakarta pintar khususnya di Kecamatan duren sawit, kota administrasi Jakarta timur provinsi DKI Jakarta.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu disadari bahwa dengan mempelajari implementasi kebijakan sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan publik kita jangan hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu program yang pada akhirnya membawa dampak pada program tersebut. Eugene mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi yaitu cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengesankan bagi telinga para pemimpin

dan pemilih yang mendengarnya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.²

Kebijakan-kebijakan dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok dan individu yang dengan demikian tujuan umum dari kebijakan tersebut dapat saja dibelokkan. Mengingat bahwa dalam banyak kasus para pelaksana kebijakan-kebijakan publik tersebut adalah administrator publik, maka tidak heran apabila kemudian mereka pulalah yang paling sibuk memodifikasi kebijakan itu sendiri demi kepentingan rezim. Menurut Van Meter dan Van Horn ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan publik yaitu: Kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal diperlukan dan konsensus tujuan tinggi titik sebaliknya bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang ingin dicapai dan cara tujuan-tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian benar implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut kebijakan publik dalam bentuk undang-

² Akib Haedar dan Antonius Tariga. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dari Kriteria Pengukurannya", *Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2012, Universitas Papabri Makasar, 2012, h. 117.*

undang pada Perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau yang sering diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat salah satu contoh kebijakan publik yang di keluarkan dalam bentuk program. Program yang dimaksud di sini adalah program kartu Jakarta pintar yang dijalankan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

2.2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Pada prinsipnya terdapat dua pemilah jenis teknik dan model implementasi kebijakan. Pemilah pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari atas ke bawah versus dari bawah ke atas dan pemilahan implementasi yang berpola paksa dan mekanisme pasar. Secara umum model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli lebih dipandang pemilahan yang pertama yang lazim disebut model top-down dan bottom-up.

Beberapa model implementasi kebijakan dikemukakan oleh para ahli diantaranya model implementasi kebijakan menurut George c. Edward III. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III disebut dengan *direct and indirect impact on implementation*. Menurut model yang dikemukakan oleh Edward III, ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi dan disposisi.

1. Faktor sumber daya, faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan titik jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
2. Faktor komunikasi, komunikasi itu sendiri ialah suatu kegiatan manusia yang menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya harapan atau pengalamannya kepada orang lain.

Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada yang dirugikan titik implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementator mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.³

3. Faktor disposisi, disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
4. Faktor struktur birokrasi, meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementator mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.⁴

Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik yaitu dengan melakukan standar operating procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

1. Standar opening procedures merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk

³ Dunn William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi ke III)*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2009), h. 72.

⁴ *Ibid.* h.73.

melakukan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit.⁵

2.3 Pengertian Program

Program merupakan bagian dari perencanaan yang secara umum program diartikan sebagai penjabaran dari suatu perencanaan. Program itu sendiri sering pula diartikan sebagai suatu kerangka dasar dari pelaksanaan kegiatan titik untuk lebih memahami mengenai pengertian program berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi dari para ahli :

1. Yang pertama ada Sutomo kayatomo yang mengemukakan bahwa “program adalah rangkaian aktivitas yang mempunyai permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan”.
2. Yang kedua ada menurut Manullang yang mengatakan bahwa “sebagai unsur dari suatu perencanaan program dapat pula dikatakan sebagai gabungan dari politik, prosedur, dan anggaran, yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu tindakan untuk waktu yang akan datang”.
3. Yang ketiga menurut Abdul Wahab yang mengatakan bahwa “kebijakan-kebijakan publik yang ada pada umumnya masih abstrak diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut”. Penjabaran suatu program setidaknya terlihat dari 5 hal yaitu :
 1. Berbagai sasaran konkret yang hendak dicapai.
 2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya.
 3. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan.
 4. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari segi jumlahnya.

⁵ *Ibid.h. 74.*

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokromidjojo yakni harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tujuan yang dirumuskan harus secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan oleh program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
6. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi masyarakatnya.⁶

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang kurang lebih sama. Sebelum suatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang diharapkan.

2.4 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Program

Dalam suatu tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat dari implementasi program itu sendiri.

1. Faktor pendorong

Yang termasuk faktor-faktor pendorong adalah :

⁶ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 113.

- a. **Komitmen pimpinan politik**
Yang di mana dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat diperlukan karena pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa.
- b. **Kemampuan organisasi**
Dalam tahap implementasi program pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.
- c. **Komitmen para pelaksana**
Salah satu asumsi yang sering kali keliru adalah jika pimpinan telah siap untuk bergerak maka bawahan akan segera ikut untuk mengerjakan dan melaksanakan suatu kebijakan yang telah disetujui amat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, psikologi, dan birokratisme.
- d. **Dukungan dari kelompok pelaksana**
Pelaksanaan program dan proyek seringkali lebih berhasil apabila mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan program-program tersebut.

2. Faktor penghambat

Yang termasuk faktor-faktor penghambat terdiri dari:

1. **Banyaknya pemain yang terlibat**
Semakin banyak pihak yang harus terlibat dalam mempengaruhi pelaksanaan program maka komunikasi akan semakin rumit dalam pengambilan keputusan jika rumitnya komunikasi maka makin besar kemungkinan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan.
2. **Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda**
Dalam banyak kasus biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan suatu program dan telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap program lain.

3. Rumitan yang melekat pada program itu sendiri

Biasanya sering adanya program mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena sifat hakiki dari program itu sendiri. Hambatan yang melekat dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi dan faktor pelaksana maupun masyarakat.

4. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak

Jika semakin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana program dilakukan maka semakin banyak dibutuhkan persiapan pelaksanaan program itu sendiri.

2.5 Konsep Pendidikan Gratis

2.5.1 Pengertian Pendidikan

Dalam pengertian yang sederhana dan umum biasanya pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik itu dari jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang mutlak yang di mana harus dipenuhi sepanjang hayat tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Dalam dictionary of education menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol khususnya yang datang dari sekolah sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara dalam kongres taman siswa yang pertama pada tahun 1930 pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar

kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita Didik selaras dengan dunianya.⁷

A. Pengertian Pendidikan Gratis

Dalam pandangan secara umum pendidikan gratis diyakini sebagai solusi untuk meretas berbagai permasalahan yang ada di masyarakat titik karena krisis etika moral, krisis penegakan hukum, krisis sosial, krisis politik, krisis ekonomi dan lain sebagainya bermula dari pendidikan yang tidak berlangsung baik. Pendidikan gratis adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang dasar 1945 di mana dalam pasal 31 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 undang-undang nomor 20 tahun 2003 kemudian menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.⁸

Salah satu janji yang paling dinanti oleh masyarakat DKI Jakarta adalah tentang pendidikan gratis terutama dalam kaitannya mewujudkan program wajib belajar 12 tahun yang telah dirintis sejak tahun 2007. Janji tersebut memang menjadi salah satu program andalan dari para calon gubernur yang bersaing dalam pemilihan gubernur provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 lalu. Pendidikan gratis di DKI Jakarta merupakan program prioritas gubernur Jakarta periode 2012-2017. Program ini merupakan janji gubernur terpilih pada saat pemilihan kepala daerah 2012 yang sudah seharusnya diimplementasikan dalam masa kepemimpinannya. Olehnya itu telah dibuat peraturan gubernur nomor 27 tahun 2013 tentang bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui kartu Jakarta pintar. Pergub nomor 27 tahun 2013 ini menjadi pembuka jalan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta akan

⁷ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2009.

⁸ *Ibid.*

menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapat pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dan biaya operasional pendidikan dan bantuan biaya personal pendidikan guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Khususnya bantuan biaya pendidikan teknis penyalurannya dilakukan melalui program kartu Jakarta pintar.

2.6 Program Kartu Jakarta Pintar

2.6.1 Pengertian Program Kartu Jakarta Pintar

Program kartu Jakarta pintar adalah program untuk warga usia sekolah miskin yang biaya personal pendidikannya diberikan oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik titik pada hakikatnya pelayanan pendidikan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan akses dan kepastian masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan minimal wajib belajar 12 tahun, terutama bagi warga yang tidak mampu atau miskin agar tercapainya derajat pendidikan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.⁹

Program kartu Jakarta pintar dilaksanakan di seluruh sekolah di DKI Jakarta. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari adanya program kartu Jakarta pintar ini antara lain :

1. Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA atau SMK.
2. Mutu pendidikan di provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan.
3. Peningkatan pencapaian target APK pendidikan dasar dan menengah.

2.6.2 Dasar hukum program kartu Jakarta pintar

Beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi pelaksanaan program kartu Jakarta pintar antara lain:

⁹ Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing : Maret. 2013.

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
3. Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota negara republik Indonesia Jakarta.
4. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2009 tentang standar nasional pendidikan.
5. Peraturan daerah provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2006 tentang sistem pendidikan.
6. Peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah.
7. Peraturan gubernur nomor 130 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi DKI Jakarta.
8. Peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 199 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 134 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja dinas pendidikan.
9. Peraturan gubernur nomor 190 tahun 2012 tentang pemberian bantuan biaya personal pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu atau miskin melalui kartu Jakarta pintar.
10. Instruksi gubernur nomor 106 tahun 2012 tentang penggunaan data rumah tangga hasil pendataan ppls 2011.
11. Pergub nomor 27 tahun 2013 tentang bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui kartu Jakarta pintar.

2.6.3 Persyaratan Penerima Program Kartu Jakarta Pintar

Pemerintah provinsi DKI Jakarta pada Tahun anggaran 2013 melaksanakan program kartu Jakarta pintar dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Membuat surat keterangan tidak mampu yang diketahui ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan kelurahan setempat.

3. Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di provinsi DKI Jakarta.
4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala sekolah komite sekolah dan kepala seksi Dikdas/dikmen Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke suku dinas atau dinas pendidikan setempat.
5. Menandatangani lembar fakta integritas yang telah disediakan.

2.6.4 Mekanisme Tahapan Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar

Dalam buku pedoman Kartu Jakarta Pintar 2013 dijelaskan mekanisme tahapan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar agar akurat dan tepat sasaran. Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) dicairkan oleh Bank DKI setiap tiga bulan sekali bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar. Setiap siswa pemegang KJP diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelajaran BPSM setiap bulan sebagai bantuan pelaporan dan sekaligus pertanggung jawaban penggunaan dana BBPP.¹⁰ Mekanisme tahapan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Mekanisme Tahapan Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar

No.	Tahapan Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Sekolah mendata peserta didik miskin sesuai standart format data individu Bank DKI setelah diberikan kuota oleh Sudin Pendidikan Setempat.	Kepala Sekolah
2	Sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima KJP yang memenuhi persyaratan, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah. Data diserahkan ke Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat.	Kepala Sekolah
3	Data peserta didik calon penerima KJP, selanjutnya diverifikasi oleh Kasi	Kasi Dikdas/Dikmen

¹⁰ *Ibid.*

	Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat	Kecamatan
4	Rekapitulasi data berdasarkan kelompok jenjang pendidikan tersebut selanjutnya dikirim ke Sudin Dikdas/Dikmen masing-masing wilayah.	Kepala Sekolah
5	Sudin/Dinas Pendidikan setempat mengesahkan kuota jumlah KJP untuk SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA.	Kasudin Pendidikan
6	Sudin/Dinas Pendidikan mengajukan daftar nama-nama siswa penerima KJP untuk pembuatan aplikasi ATM ke Bank DKI	Kasudin Pendidikan
7	Rekap data penerima BPSM KJP dikirim ke Dinas Pendidikan melalui Seksi Kerja Sama Antar Lembaga (KAL)/Persekolahan.	Dinas Pendidikan
8	Pemyerahan ATM KJP kepada peserta didik penerima BPSM.	Bank DKI
9	Siswa membuat rencanapembelanaan BPSM KJP Triwulan I,II,III,IV.	Sekolah
10	Siswa dan orang tua siswa menandatangani Surat Pernyataan Kesiadaan membelanjakan BPSM/KJP untuk pemenuhan kebutuhan sekolah.	Sekolah
11	Siswa menyerahkan laporan pembelanjaan BPSM/KJP setiap bulan.	Sekolah
12	Sekolah membuat rekapitulasi pembelanjaan seluruh siswa penerima KJP setiap Triwulan.	Kepala Sekolah
13	Sekolah melaporkan pembelanjaan BPSM untuk seluruh siswa penerima KJP setiap Triwulan I,II,III,IV ke Suku Dinas Pendidikan.	Kasudin Pendidikan

(Sumber : Buku Pedoman Program KJP 2013 hal. 12)

2.6.5 Unit Cost Program Kartu Jakarta Pintar

Pemberian BBPP bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Program Kartu Jakarta Pintar didasarkan pada perhitungan besaran unit cost per peserta didik per bulan untuk satu tahun anggaran sebagai berikut :

1. SD/SDLB/MI sebesar Rp. 180.000,- (Rp. 2.1600.000/tahun).
2. SMP/SMPLB/MTs sebesar Rp. 210,000,- (Rp. 2.520.000/tahun)
3. SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA sebesar Rp. 240.000,- (Rp. 2.880.000/tahun)

Adapun untuk pemenuhan unit kebutuhan bagi peserta didik yang menjadi peserta Program Kartu Jakarta Pintar yaitu mencakup sebagai berikut.

Tabel 2.2
Unit Cost Program Kartu Jakarta Pintar

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Tindak Lanjut
1	Siswa membelanjakan BBPP diluar kebutuhan sekolah (membeli HP, Menonton Film, dll)	BBPP/KJP dicabut	Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima BBPP KJP
2	Orang tua membelanjakan BBPP untuk kebutuhan rumah tangga diluar kepentingan sekolah	BBPP/KJP dicabut	Digantikan dengan siswa miskin lain yang belum menerima BBPP KJP.
3	Sekolah memanfaatkan dana BBPP siswa penerima KJP untuk pelunasan administrasi keuangan sekolah (Khusus Sekolah Swasta)	Kepala Sekolah diberikan peringatan kerah oleh Kasudin	Kepala Sekolah membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi.

(Sumber : Buku Pedoman Program KJP 2013 hal. 17)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan menyimak pemaparan informasi dan menganalisis hasilnya, maka dapat dilakukan penelitian tentang Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Duren Sawit.

Berdasarkan pengamatan terhadap proses pelaksanaan program dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program, pelaksanaan program KJP ditingkat SMA/SMK berjalan dengan baik dan lancar, namun dari hasil penelitian ditemukan beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki.

Tahapan pelaksanaan program KJP dimulai dengan sosialisasi, verifikasi data penawaran penerima KJP, penyaluran dana dan pelaporan pengeluaran dana. Beberapa kegagalan ditemukan selama tahap implementasi ini, antara lain kurangnya perhatian praktisi, informasi tidak sinkron dan merata, koordinasi antar praktisi kurang optimal, dan tidak adanya uji coba publik, backlog selama distribusi.

KJP menemukan beberapa kendala yang menghambat keberhasilan kebijakan program, seperti sumber daya yang tidak mencukupi, spesifikasi unit pelaksana yang tidak ketat dan kaku, ketidaksepakatan beberapa unit pelaksana dengan program, komunikasi yang buruk dan tingkat manajemen yang rendah, kepatuhan masih lebih rendah dari siswa dan orang tuanya.

Faktor pendukung keberhasilan kebijakan program KJP ditemukan beberapa pendukung antara lain sosialisasi informasi kepada siswa dan orang tua siswa, prosedur verifikasi dan pelaporan pengeluaran dana cukup jelas dan mudah dipahami, ketentuan jangka waktu pelaporan pengeluaran dana KJP.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka oeneliti memberikan berbagai saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan

pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar khususnya di tingkat SMA/SMK di Kecamatan Duren Sawit yaitu :

- a. Bagi Dinas Pendidikan ataupun Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur hendaknya dapat memperhatikan sumberdaya program KJP ini agar lebih memadai. Jumlah Tim Perencanaan dan Pengendalian Program KJP dan Kasi Pendidikan Kecamatan perlu ditambah, agar kelangsungan implementasi program KJP dapat lebih maksimal. Maajemen pengawasan program juga menjadi sisi yang harus mendapat perhatian serius.
- b. Bagi kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan Duren Sawit hendaknya dapat lebih memaksimalkan perannya selaku agen pelaksana di tingkat sekolah SMA/SMK, Bank DKI cabang terdekat, bahkan jika diperlukan hingga para ketua RT dan RW. Koordinasi berupa pertemuan atau forum resmi harus lebih sering dilakukan guna terbangunnya komunikasi yang baik. Hal ini dilakukan agar meminimalisir ketidakjelasan informasi pada agen pelaksana dibawahnya, selain itu pengawasan program dapat berlangsung lebih efektif.
- c. Bagi agen pelaksana di sekolah hendaknya dapat kembali memakai julukan yang sangat melekat dengan profesi seorang guru laksana pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah pelita bagi anak-anak Indonesia mengejar cita-citanya. Oleh karen aitu butuh ketulusan dan semangat pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan segala tanggung jawab yang diberikan di sekolah. Tidak terkecuali dalam program KJP ini. Jika memang belum ada fasilitas atau insentif khusus dari bergulirnya program KJP ini, diharapkan guru tetap pada motovasi yang tinggi dalam mensukseskan program KJP.
- d. Kepala sekolah harus menyiapkan sumberdaya yang memadai dan kompeten. Bagaimanapun pihak sekolah yang lebih mengetahui kondisi latarbelakang perekonomian peserta didiknya. Setiap sekolah harus mampu membuat peta kondisi ekonomi semua peserta didiknya, agar lebih mudah dan akurat dalam melakukan proses penseleksian peserta didik penerima KJP. Selain itusikap keras dan ketat terhadap pelanggaran yang terjadi harus ditingkatkan.

- e. Bagi masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta, hendaknya harus memahami dan mentaati ketentuan umum bahwa program KJP adalah program yang khususnya diperuntukkan untuk peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu. Sikap oportunis harus mampu dikendalikan, agar program KJP dapat benar-benar menysasar tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solihin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, Cetakan ke-2.
- Dunn N, William. 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Fuad dan Nugroho. 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: Fisip Untirta Press
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: gama press, 1987). 63.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: YPFAK, Psikologi UGM, 1985),h.89
- Inu Kencana Syaffie. 2008. *Pengantar Ilmu Pemerintah*. Jakarta : PT. Renika Cipta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Petunjuk Teknik Program Indonesia Pintar (PIP), (Jakarta : Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas,2016),h.2.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandun g: PT. Remaja Rosadakarya, 2006). 6.
- M. Iqbal hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 81.

- Mohamad, Nuh. 2013. *Menyemai Karakter Peradaban Renungan Tentang Pendidikan Agama dan Budaya*. Jakarta : Zaman.
- Nawawi, Hadar. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gama Press.
- Rohman Arif. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Rusdiana H.A. 2015. *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rusli Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Hakim Publishing. Maret.
- Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia,2019. 6-7.
- Sedermayanti, Hidayat Syarifudin. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata Sumadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tahir Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Utami Budi dkk, *Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta 2014*, Jakarta : BPS Provinsi DKI Jakarta, 014
- Winarno Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : Buku Seru.

Sumber Jurnal

- Abdul Qohar, “*Revitalisasi Manajemen Pemerintahan Modern*”. Jurnal Tapis Vol. 8 Juli-Desember 2012.
- A, Afriansyah, Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta, Jurnal Kependudukan, 2017
- Akib, Haedar dan Antonius Tariga “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan, Persepektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*”, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2012, Universitas Papabri Makasar, 2012.

Dody Setyawan, Agus Priantono NC, Firman Firdausi, Model George Edward III : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Malang, Jurnal Politik & Sosial, Vol.3, 2021, No.2.

Eka Febrian. 2017. *Implementasi Bina Lingkungan Walikota Dalam Bidang Pendidikan. Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung.*

George Edward III, Implementasi Kebijakan Publik, 1980.

Noor Komari Pratiwi. Pengaruh Tingkat Pendidikan Perhatian Orang Tua dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia SMK Kesehatan di Kota Tangerang, Jurnal Pujangga, Vol. 1, 2015, No. 2.

Sekhul Islam. 2011. *Efektivitas Bantuan Siswa Miskin Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Mts Al-Munawanah Harjawinangun Balapulang Tegal Tahun Pelajaran 2010/1011.* Tegal : Universitas Pancasakti

Sumber Peraturan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Petunjuk Teknik Program Indonesia Pintar (PIP), (Jakarta : Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2016).

Peraturan Gubernur Pasal 9 No. 27 Tahun 2013 Tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Program Kartu Jakarta Pintar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pinar.

Undang-Undang Dasar 1945

Sumber Online

<https://indonesiapintar.kemendikbud.go.id/>(Diakses pada, 12 Desember 2019 pukul 20.58 WIB).

Sumber Wawancara

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian

Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit

Pewawancara : Putri Safitri Darmayanty

- A. Identitas Informan
 1. Nama
 2. Alamat
 3. Umur
 4. Pendidikan Terakhir

- B. Pendahuluan
 1. Perkenalan Diri
 2. Menjelaskan Maksud dan Tujuan Wawancara Disertai Manfaat Wawancara

- C. Pertanyaan Wawancara
Mewawancarai Informan Dengan Merekam Isi Pembicaraan Dengan Audio atau Penulisan Tangan.

Staff Kesiswaan/ Operator KJP

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjabat sebagai Staff Kesiswaan sekaligus Operator KJP INI ?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan sumber daya yang ada dalam KJP ini ?
3. Bagaimana Bapak/Ibu berkomunikasi dengan orang tua siswa penerima KJP ini perihal pembahasan KJP ?
4. Apakah KJP ini sudah tepat sasaran ?
5. Apa tujuan dan harapan Bapak dan Ibu untuk Program KJP ini ?

Orang Tua Siswa Penerima KJP

1. Apakah benar bahwa anak ibu mendapatkan bantuan Program KJP ?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan sumber daya yang ada dalam KJP ?

3. Bagaimana pihak sekolah memberitahukan perihal KJP kepada Bapak/Ibu ?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah KJP ini sudah tepat sasaran ?
5. Apa harapan Bapak/Ibu untuk program KJP ini ?

Siswa Penerima KJP

1. Apakah benar kamu siswa penerima KJP ?
2. Bagaimana pendapat saudara perihal KJP tersebut ?
3. Bagaimana saudara mengetahui tentang informasi KJP tersebut ?
4. Menurut saudara apakah KJP ini sangat membantu ?
5. Apa harapan saudara untuk Program KJP tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Darip

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua RT 009 Kp Baru

Hari/ Tanggal Wawancara : 12 Juli 2022

Tempat : Kediaman Bapak Darip

2. HASIL WAWANCARA

Peneliti : Assalamualaikum pak, sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak karena bapak udah mau saya wawancara hehe.

Bapak Darip: waalaikumsalam, haha iya gak masalah put kalo saya bisa bantu ya pasti saya bantu lah. Jadi gimana mau tanyaapa ?

Peneliti : menurut bapak gimana pemahaman warga tentang program KJP itu sendiri?

Bapak Darip: hmm ya itu si tergantung pribadi orangnya yaa karenakan KJP ini juga udah lama pasti udah pada paham lah apafungsinya, kayak kartu KIS kan fungsinya dalam bidang kesehatan nah kalo untuk KJP ini di dalam dunia pendidikan gitu.

Peneliti : hmm terus kalau menurut pemahaman bapak sendiri gimana pak tentang KJP ini?

Bapak Darip: kalau menurut saya jadi KJP ini kan sesuai dengan namanya Kartu Jakarta Pintar yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tujuannya untuk keluarga yng kurang mampu dalam biaya pendidikan anak sekolah hmm ya tujuan dari rencana program ini untuk memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan gitu.

Peneliti : nahh kalo untuk penyusunan sumber manusianya atau struktur birokrasinya itu gimana ya pak?

Bapak Darip: Mungkin yang kamu maksud struktur birokrasi ini giniya put. Jadi kalo untuk struktur birokrasi lembaganya itu kan punya tugas dan wewenang masing-masing. Jadi pertamanya itu dari

pemerintah pusat, itu ada yang khusus gitu namanya kalo gak salah sih Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Terus mereka itu mendata semua warga yang berhak menerima KJP berdasarkan data yang ada di badan statistik, kemudian data yang dari statistik itu di input untuk kemudian disetor lah ke pemerintah pusat. Terus pemerintah pusat ini bekerja sama dengan pihak Bank DKI untuk mengelola pembuatan Kartu Jakarta Pintar, nah nanti kartunya itu turun ke pihak Bank DKI pusat abis itu baru kemudian dari Bank DKI pusat nantinya dibagikan ke kantor cabang Bank DKI, nanti dari kantor cabang Bank DKI ini menginfokan kepada sekolah-sekolah yang berada disekitar dan juga yang terdapat datanya di Bank DKI tersebut untuk menginfokan bahwasannya ada nama-nama siswa/siswinya yang terdaftar sebagai penerima KJP. Dan biasanya juga walaupun daftar KJPnya barengan tapi belum tentu turun kartu dan buku tabungannya juga barengan, jadi bertahap gitu dia prosesnya.

Peneliti : hmm jadi begitu ya pak yang ngedata itu bukan dari RT terus disetor ke kelurahan, terus gak langsung turun semua ya pak kartunya secara bertahap gitu hmm

Bapak Darip: iya warga kan taunya RT yang ngedata karena pada proses pendistribusian ditugasin ke RT padahal mah kita gak ngedata, orang taunya kartu itu udah dan selebihnya di pihak sekolah dan Bank DKI yang tahu urusannya. RT mah hanya membantu proses pada saat pembuatan surat keterangan tidak mampu saja..

Peneliti : terus menurut bapak pribadi gimana si pak pembagian kartu ini sudah sesuai belum dengan apa yang menjadi rencana program KJP sendiri?

Bapak Darip: ya maksud kamu sudah tepat atau belum mungkin gitu yaa, bisa dibilang enggak 100% tepat sasaran. Karena apa? Banyak dari warga yang dapet itu justru orang-orang yang terbilang cukup mampu, sedangkan ada warga yang terbilang ekonominya kurang tapi dia gak dapet.

Peneliti : hmm begitu ya pak kemudian untuk sumber dana anggarannya itu bagaimana pak?

Bapak Darip: jadi gini kalo soal dana anggaran itu asalnya tetep dari pemerintah pusat. Karena kan kalau pemerintah pusat itu ngeluarin kebijakan pasti sudaah ada yang namanya dana untuk

menjalankan kebijakan tersebut. Untuk KJP ini sendiri pemerintah pusat itu membuat sebuah aturan atau bisa dibilang juknisnya lah jadi kalau kita mau melaksanakannya yaa harus sesuai sama juknis tersebut. Contohnya untuk anak SMK Kawula Indonesia ini kan yang dapat kartu KJP terus didaftarkan ke sekolah dapat dana anggaran sebesar 450.000 untuk satu bulan, nah dana yang dikasih itu dari dana BBPP, yang dimana dana tersebut memang sudah dipersiapkan oleh gubernur kita untuk pembiayaan sekolah masyarakat DKI Jakarta.

Peneliti : terus apa sih harapan bapak kedepannya terkait program ini?

Bapak Darip: harapannya kedepannya si lebih ke masalah pendataan warganya saja, supaya lebih di upgrade lagi datanya karena kan itu datanya kurang sesuai malah yang dapat orang yang mampu yang gak mampu malah gak dapat. Harapannya si ya itu terkait pendataan aja lah.

Peneliti : baik terimakasih banyak pak atas waktunya dan terimakasih juga sudah banyak memberikan informasi.

Bapak Darip: sama-sama put, kalau ada yang kurang jelas nanti dateng lagi aja.

Peneliti : baik pak hehe



RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Ita Kusmala
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Operator KJP SMK
Kawula Indonesia
Hari/ Tanggal Wawancara : 09 Juli 2022
Tempat : SMK Kawula
Indonesia

2. HASIL WAWANCARA

Peneliti : Assalamualaikum bu, sebelumnya saya mengucapkan terimakasih banyak karena ibu sudah bersedia luangin waktunya untuk saya wawancara hehe. Maaf bu saya izinbertanya apasih yang ibu ketahui tentang kartu KJP itu?

Ibu Ita Kusmala: Iya mbak tidak apa-apa kok, saya jawab sebisa saya yaa hehe. Setau saya ya kartu KJP itukan program pemerintah yang dikeluarin diera bapak Anies Baswedan yaa tujuannya kan untuk membantu biaya pendidikan anak usia sekolah yang berupa uang tunai terus berasal dari keluarga yang kurang mampu dan terdaftar sebagai keluarga penerima PKH juga. Nah setau saya juga kalo KJP ini kan waktu itu keluarnya barengan sama KIS, KKS gitu. Kalo KJP kan untuk anak sekolah, nah kalo KIS itu ya berkaitan sama kesehatan gitu.

Peneliti : Iyaa bu KJP itu salah satu dari 3 kartu yang jadi program unggulan dari Pak Anies Baswedan, nah terus kalau menurut ibuk sendiri ada gak sih buk manfaat yang bisa diperoleh dari program ini?

Ibu Ita Kusmala: hmm kalo untuk manfaat yaaa pasti namanya programnya manfaat yaa jadi meringankan biaya pendidikan anak yang pastinya si untuk kebutuhan anak itu sendiri ya kayak contohnya untuk beli

buku, baju sekolah, beli sepatu, tas ya masih banyak lagi lah mbak hehe.

Peneliti : terus kalau menurut ibu sudah tepat sasaran atau belum buk pembagian KIP ini?

Ibu Ita Kusmala: yaa kan KJP ini pada dasarnya untuk masalah pendidikan yaa yang orang tanya kurang mampu, terus dia dari keluarga sejahtera, tapi masih banyak yang gak dapet sedangkan dari keluarga yang mampu malah dapet. Nah kami kan pihak sekolah tugasnya menginformasikan kepada siswa yang kurang mampu untuk mendaftarkan dirinya dan membuat surat oenganter dari RT/RW dan juga SKTM. Tugas kami pihak sekolah kan hanya menginfokan mbak, untuk diterima atau tidaknya itu diluar dari tugas kami, karena kami kan hanya menjadi perantaranya saja.

Peneliti : kalau terkait pencairan itu persatu semester atau bagaimana ya buk? Sama berapa jumlah yang diterima siswa itu buk?

Ibu Ita Kusmala: terkait dengan pencairan itu di KJP ini beragam ya mbak, karna dia ada yang setiap satu bulan sekali untu kebutuhan pokok dan ada yang satu semester sekali untuk pembayaran spp. Kalau ditanya besarnya berapa, biasanya untuk yang satu bulan sekali sebesar Rp 450.000 dan untuk yang satu semester sekali ini biasanya sekitar Rp 1.500.000 mbak.

Peneliti : kemudia bagaimana cara ibu memberitahukan kepada orangtua siswa yang mendapatkan KJP buk?

Ibu Ita Kusmala: untuk menginformasikan kepada pihak orang tua biasanya kami melakukan sosialisasi mbak, biasanya kami undang orang tua siswa untuk datang kesekolah dan disitu nantinya kami menjelaskan tentang program dan lain sebagainya ya semacam rapat gitu mbak biasanya.

Peneliti : hmm begitu ya buk, terus kalau untuk sumber dayanya gimana ya buk? Sumber daya anggaran dan manusianya gitu buk? Sudak mendukungah?

Ibu Ita Kusmala: kalau untuk sumber daya manusianya si menurut saya sudah cukup ya mbak yaa dibilang gak ada masalah lah karena kan biasanya saya dibantu juga sama bendahara sekolah untuk ngurusinnya hehe, kalau saya sendiri yang ngerjainnya mah takutnya kelabakan kan karena kan banyak juga tugas yang mesti di kerjain. Terus kalau kebanyakan juga gak bisa karena kan nggak ada

anggaran untuk nggajinya mbak, yaa paling juga kalau ada dari wali murid yang ngasih sebagai ungkapan terimakasih hehe.

Peneliti : terkait proses pelaksanaannya itu bagaimana buk? Untuk pencairan, penyaluran dan pengambilan dananya itu orangtua murid atau gurunya buk?

Ibu Ita Kusmala: ohh kalau untuk dana pencairan tiap bulan kan langsung masuk ke ATM siswanya langsung mbak, jadi yang mengambil dana tersebut ya bisa siswa nya langsung. Tapi untuk yang per semester ini nanti di bantu sama pihak sekolah. Yang dimana nantinya pihak sekolah menyiapkan surat semacam pendebetan spp gitu dan di tandatangani oleh siswa dan orang tua siswa dan juga yang pastinya tanda tangan tersebut harus diatas materai.

Peneliti : oh gitu ya buk, terus ada gak sih buk harapan atau perubahan apa gitu yang ibu harepin gitu dari adanya program ini?

Ibu Ita Kusmala: harapann yaa, kalo harapan pribadi saya si pengennya kartu KJP ini berjalanlah sesuai dengan tujuannya dan ya bisa meringankan orang yang kurang mampu untuk sekolah. Terus juga untuk masalah datanya itu lh coba diteliti atau gak diupdate lagi masa orang yang mampu masih dapet tapi orang yang gak mampu malah gak dapet kan kasian. Ya itu aja si harapan saya kedepannya supaya pendidikan kita ini lebih maju lagi.

Peneliti : iyaa bukk ammiinn semoga ya buk, baik buk terimakasih banyak atas waktu dan informasinya ya buk.

Ibu Ita Kusmala: hmm iya sama-sama ya mbak semoga cepet selesai skripsinya dan lancar biar gak revisi-revisi lagi hehe

Peneliti : hehehe iyaa bu, saya permisi ya bu, terimakasih sekali lagi ya bu.



RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Romzah
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Wali Murid Penerima KJPHari/ Tanggal
Wawancara
: 10 Juli 2022 Tempat : Rumah ibu Romzah

2. HASIL WAWANCARA

- Peneliti : hehe maksud tujuanku datang kesini itu mau wawancara bu, langsung aja bu wawancaranya karena masih banyak yang mau putri wawancara lagi hehe.
- Ibu Romzah : iya gakpapa ti, yaudah kamu mau wawancara apa nanti saya jawab.
- Peneliti : bener gak sih bu kalo anak ibu ini salah satu penerima kartu KJP?
- Ibu Romzah : ohh kartu KJP ya bener dapet nah, dapet semua saya bukan karena ngerendah yaa tapi emang dari dulu saya dapet semua.
- Peneliti : menurut ibu sendiri apa si manfaat yang ibu dapet dengan adanya kartu KJP ini?
- Ibu Romzah : kalo ditanya manfaat si pasti bermanfaat banget buat kita apalagi orang yang kurang mampu ini, bisa buat beli buku, beli tas, beli sepatu.
- Peneliti : terus menurut ibu nih untuk pembagiannya udah tepat belum si bu?
- Ibu Romzah : kan kartu KJP ini buat orang yang gak mampu ya tii, tapi ya faktanya masih ada aja orang yang mampu ehh tapi malah dapet kebalikannya orang yang gak mampu malah gak dapet kan ane h h yaa, jadi kalo menurut saya pembagiannya belum efektif lah.

- Peneliti : hmm terus untuk pelaksanaan kartu itu sendiri gimana bu? Apa sekolah ngasih sosialisasi gitu?
- Ibu Romzah : iya dikasih tahu sama sekolahnya, biasanya sih ya kalau anak saya kemarin disekolahnya itu sekolah minta surat pengantar RT/RT dan SKTM gitu tii, untuk nantinya di daftarkan kedinasnya katanya gitu.
- Peneliti : hmm berarti pihak sekolah itu ngasih sosialisasi gitu ya bu, terus untuk pelayanan dari pihak sekolahnya gimana itu bu?
- Ibu Romzah : yaa alhamdulillah ti pelayanan dari sekolahnya baik, kita diarahin sama gurunya itu uangnya untuk apa ajaa terus kalo ada pencairan dikabarin.
- Peneliti : alhamdulillah kalo gitu ya bu, nah harapan ibu kedepannya buat pemerintah terkait pembagian yang kurang tepat tadi gimana?
- Ibu Romzah : program ini tuh bagus tii karena kan sangat membantu masyarakat apa lagi yaa kayak saya ini. Alhamdulillahnya masih dapet bantuan, karena kalau gak dibantu sama pemerintah bingung saya biaya dari mana coba. Harapan saya sih semoga bantuan ini ada terus dan berlanjut ke program yang lain jadi yang belum dapet dan belum kebagian bisa ngerasain juga nantinya, datanya juga biar diperbarui lagi lah kasian masa kebalik gitu.
- Peneliti : hehe iya bu semoga harapan kedepannya bisa terlaksana dengan baik ya bu. Makasih ya bu sebelumnya untuk waktu dan informasinya ini.
- Ibu Romzah : hehehe iya sama-sama tii, semoga cepet selesai yah skripsinya.



RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Mastur
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Wali Murid Penerima KJPHari/ Tanggal
Wawancara : 10 Juli 2022
Tempat : Rumah Bapak Mastur

2. HASIL WAWANCARA

Peneliti : sebelumnya maaf mang mengganggu waktunya, kayak yang aku jelasin tadi maksud tujuanku kesini mau wawancara mamang, langsung aja ya mang apa anak mamang itu bener dapet kartu KJP?

Bapak Mastur : iya gakpapa kok dek lah oraang aku aja lagi santai ginikok, KJP ya? Hmm bener dek anak saya dapet kartu KJP hehe terus gimana gimana?

Peneliti : terus mamang tau gak si apa kartu KJP itu sendiri?

Bapak Mastur : hmm itu kan kartu yang dikasih sama pemerintah yaa untuk anak sekolah yang kurang mampu buat beli-beli keperluannya gitu si setau saya.

Peneliti : hmm berarti mamang paham ya mang buat anak yang kurang mampu, tapi maaf ya mang kan rumah mamang bagus ini masa masih dapet si?

Bapak Mastur : hehehe ya alhamdulillah kalo dibilang bagus, jadi kenapamamang bisa dapet itu kan karena sebelum rumah mamang kayak gini mamang itu masih dapet semua bantuan yang dari pemerintah walaupun ada yang gak dapet, Cuma ya kurang paham juga kok sampe sekarang masih dapet gitu mungkin datanya belum diupgrade sama pemerintahnya makanya sampe sekarang mamang masih dapet.

Peneliti : oh gitu, terus kalau untuk pelaksanaannya itu gimana ya mang?

Apa dari pihak sekolah atau gimana mang?

Bapak Mastur : yaa pihak sekolah itu nah yang ngasih tau kalau dari keluarganya yang kurang mampu terus mau daftar jadi penerima KJP ya dibantu sama sekolahnya dengan membawa surat keterangan RT/RW dan SKTM. Untuk di daftarin KJPnya.

Peneliti : berarti dari pihak sekolahnya ngasih tau ya mang. Terus kalau untuk pelayanan dari pihak sekolahnya gimana mang?

Bapak Mastur : ya baik si pelayanannya Cuma itu kadang kalau pas pencairan suka lama gitu, pernah juga mamang gak dikabarin kalau besoknya disuruh ke bank ngambil uang mamang malah taunya dari orang-orang disini.

Peneliti : hmm gitu ya mang, menurut mamang sendiri nih jadi KJP ini bisa dibilang tepat sasaran atau enggak si dengan kondisi mamang yang sekarang?

Bapak Mastur : hehehe yaa kalo diliat dari kondisi mamang sekarang si dibilang kurang tepat yaa, ada yang lebih susah lagi dari mamang tapi malah gak dapet. Cuma ya mamang kan dari dulu dapetnya makanya sampe sekarang masih dapet, coba kalau diupgrade mungkin mamang gak dapet ya gak ppa lah jadi biar ikut ngersain gitu manfaatnya.

Peneliti : hmm berarti kurang tepat ya mang, terus harapan mamang kedepannya untuk program ini gimana?

Bapak Mastur : yaa kayak yang mamang bilang sebelumnya gituu datanya diupgrade lah biar yang kondisinya yang dibawah mamang ini bisa dapet gitu, sama kalo proses pencairan itu jangan terlalu lama ya hehe. Udah sih itu aja tanggapan mamang mah tii.

Peneliti : hehehe iya mang biar programnya ini lebih efektif lagi yaa, yaudah mang makasih banyak yaa mang.

Bapak Mastur : Iya neng sama-sama.



RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Dinda Yuliza
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Murid Penerima KJPHari/ Tanggal
Wawancara : 11 Juli 2022
Tempat : Rumah Ibu Romzah

2. HASIL WAWANCARA

Peneliti : sama kayak ibu ya dek, mba mau wawancara kamu jugakan kamu yang dapet nih KJPnya.

Dinda : iya mba.

Peneliti : adek tau gak apa kerjaan ayah sama ibunya?

Dinda : hmm kalo bapak kerjanya apa yaa itu nama buruh mbak, nah kalo mamak gak kerja mbak dirumah ajaa.

Peneliti : apa sih yang kamu tau tentang KJP ini?

Dinda : bantuan untuk murid yang kurang mampu mbak.

Peneliti : kamu tau gak apa manfaatnya KJP? Terus selama ini uangnya dipake untuk apa?

Dinda : hmm buat beli kebutuhan sekolah mbak, kadang buat jajanjuga si hehe.

Peneliti : emangnya kalau pas dananya keluar itu dapet berapadek?

Dinda : dapet Rp 450.000 mbak.

Peneliti : terus gimana caranya kamu tahu dana itu kapan turunnya dek?

Dinda : jadii biasanya aku tahu dari sekolah kalau dananya turun atau paling aku liat sendiri sih di websitenya KJP. Tapi kalau pada saat nantinya pendebetan SPP itu biasanya dari pihak sekolah yang ngasih tau dengan mengadakan rapat dengan orang tua mbak.

Peneliti : terus fasilitas disekolah gimana? Udah bagus belum dek?

Dinda : udah mbak udah lengkap udah bagus.

Peneliti : yaudah dek makasih ya kalau gitu.

Dinda : iya mbak sama-sama



RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Lina Triariani
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Murid Penerima KJP
Hari/Tanggal Wawancara : 12 Juli 2022
Tempat : Sekolah SMK Malaka Jaya

2. HASIL WAWANCARA

Peneliti : maaf sebelumnya ya dek mba ganggu waktunya sebentar, mba mau wawancara kamu, kamu dapet KJP yah?.

Lina : iya mbak.

Peneliti : adek tau gak apa kerjaan ayah sama ibunya?

Lina : hmm kalo ayah kerjanya borongan mbak aku juga gak ngerti bener, nah kalo ibu gak kerja mbak dirumah ajaa.

Peneliti : apa sih yang kamu tau tentang KJP ini?

Lina : bantuan untuk murid yang kurang mampu mba.

Peneliti : kamu tau gak apa manfaatnya KJP? Terus selama ini uangnya dipake untuk apa?

Lina : hmm buat beli kebutuhan sekolah mbak tapi kadang dipakesama ibu gak tau itu.

Peneliti : terus gimana sekolah ngasih taunya dek?

Lina : iyaa dikasih tahu sama pihak sekolah sib mbak biasanya kalau dana sudah turun, tapi biasanya kalau dana yang turun perbulan itu aku biasanya tahu dari orang lain mbak, karn akan itu dananya langsung masuk ke atm yang sudah di sediakan khusus untuk KJP. Tapi kalau dana yang turun untuk pendebetan SPP biasanya pihak sekolah memberikan surat pemberitahuan gitu untuk dikasih ke orang tua

Peneliti : pihak sekolah itu nanya-nanya gak uangnya dipake untuk apa aja gitu?

Lina : suka nanya si mbak, Cuma ya jawab aja lah.

Peneliti : terus fasilitas disekolah gimana? Udah bagus belum dek?

Lina : udah mbak udah lengkap udah bagus.

Peneliti : yaudah dek makasih ya kalau gitu.

Lina : iya yuk sama-sama.











YAYASAN PENDIDIKAN AS-SALAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PETRI JAYA
JAKARTA
KELOMPOK : BISNIS DAN MANAJEMEN
TERAKREDITASI "B"

Jln. Curug Raya No. 7 Pd. Kelapa, Kali Malang Jakarta Timur,
TELP. 8652677

Nomor : 641 / SMK.PJ/ XI / 2022
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian

10 Juli 2022

Kepada Yth,
Bapak/ Ibu Dekan Fakultas

Di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Bapak / Ibu nomor : B.962/UN.16/DU.I/PP.009.7/07/2022 , tertanggal 1 Juli 2022 tentang Ijin mengadakan Research / Penelitian maka bersama ini kami SMK Petri Jaya memberikan Ijin kepada Mahasiswa Bapak/ Ibu yang bernama :

No.	Nama	NPM	Jurusan
1.	Putri Safitri Damayanty	1831040108	Pemikiran Politik Islam

Untuk melaksanakan Penelitian di SMK Petri Jaya.

Demikian Balasan ini kami sampaikan , atas kerja sama bapak / ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala SMK PETRI JAYA



Nurainih, S.Sos



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Dedy Soesanto Sukromo 1, Telp. (0721) 903278, Bandar Lampung 35133

Nomor: B. 067/UN.16/DE/UPP.009/7.07/2022 05 Juli 2022
Lampiran: -
Perihal: **Mohon Izin Mengadakan
Research / Penelitian**

Kepada Yth
Kepala Sekolah SMK Petri Jaya
Jl. Curung Raya No 7
Jakarta Timur

Assalamu'alaikum wr wb

Sehubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM: Putri Safitri Darmayanti / 1831040108
Jurusan: Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi: Implementasi Kartu Jakarta Pintar Terhadap Prestasi Siswa Di Kecamatan Duren Sawit (Studi Kasus Sekolah Menengah Ke Atas Di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur)

Berkenaan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research / Penelitian

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr wb



Tembusan

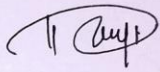
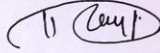
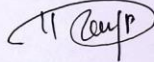
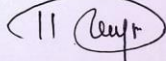
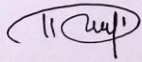
Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

KARTU ABSENSI MUNAQOSAH

NO	NAMA MAHASISWA / NPM / JUDUL SKRIPSI	TANDA TANGAN SEKRETARIS SIDANG
1	Ditri Anggodo Rifaputra//1831040223 Strategi Rekrutmen Kader Peremouan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	
2	Sisy Tri Lestari//1831040001 Kineja Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Kisau Kecamatan Muara Dua Kabupaten Oku Selatan)	
3	Anisa Febrianti Putri//1831040062 Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengatasi Dekadensi Moral Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur (Studi Pada Kasus Sidomakmur Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur)	
4	Salsadella Puspitasari//1831040031 Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)	
5	Aldo Febiranda Mega Putra//1631040075 Konsep Sistem Politik Wilayah Al-Faqih dalam Syiah Imamiyah dan Relevansinya dengan Demokrasi Modern	

Mengetahui

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam



**Abdul Qohar, M.Si.
NIP.197103122005011005**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp. (0721)780887

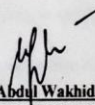
LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : "Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Terhadap
Prestasi Siswa di Kecamatan Duren Sawit"
NAMA : Putri Safitri Darmayanty
NPM : 1831040108
PROGRAM STUDI : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS : USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

MENYETUJUI

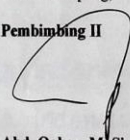
Untuk Dimunaqosahkan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Raden Intan Lampung

Pembimbing I

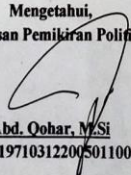

Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
NIP. 197503172003121003

Bandar Lampung, 2022

Pembimbing II


Abd. Qohar, M. Si
NIP. 197103122005011005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam


Abd. Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 6873 / Un.16 / P1 /KT/I / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR TERHADAP PRESTASI SISWA
DI KECAMATAN DUREN SAWIT**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/ PRODI
PUTRI SAFITRI DARMA YANTY	1831040108	FUSA/ PPI

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21 %. Dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 17 Januari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

skripsi

by Putri 4

Submission date: 11-Jan-2023 11:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 1991072624

File name: Putri_Safitri_D_Turnitin.doc (2.42M)

Word count: 24038

Character count: 159181

skripsi

by Putri 4

Submission date: 11-Jan-2023 11:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 1991072624

File name: Putri_Safitri_D_Turnitin.doc (2.42M)

Word count: 24038

Character count: 159181

skripsi

ORIGINALITY REPORT

21 %	20 %	2 %	7 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	7 %
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	6 %
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
4	lib.ui.ac.id Internet Source	1 %
5	media.neliti.com Internet Source	1 %
6	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	<1 %
7	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
8	profilsdnkemayoranempatbelaspetang.blogspot.com Internet Source	<1 %
9	docplayer.info Internet Source	<1 %

skripsi

ORIGINALITY REPORT

21 %	20 %	2 %	7 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	7 %
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	6 %
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
4	lib.ui.ac.id Internet Source	1 %
5	media.neliti.com Internet Source	1 %
6	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	<1 %
7	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
8	profilsdnkemayoranempatbelaspetang.blogspot.com Internet Source	<1 %
9	docplayer.info Internet Source	<1 %

10	anzdoc.com Internet Source	<1 %
11	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
14	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.lppmunindra.ac.id Internet Source	<1 %
16	Bambang Ari Satria. "STUDY ON IMPLEMENTATION OF WAREHOUSE RECEIPT POLICY IN PEPPER COMMODITIES IN BANGKA BELITUNG ARCHIPELAGO PROVINCE", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2020 Publication	<1 %
17	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1 %
18	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %

20	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
21	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
22	123dok.com Internet Source	<1 %
23	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
24	ojs.itb-ad.ac.id Internet Source	<1 %
25	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
26	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
27	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
29	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
30	Finartin Uki, Asni Ilham. "Pengaruh Kemandirian Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar di SDN 03 Limboto Barat Kabupaten	<1 %

Gorontalo", Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan
Nonformal, 2020

Publication

31	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
32	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
33	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
34	satpolpp.salatiga.go.id Internet Source	<1 %
35	www.suronews.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On